KONSULI
Knowledge on Sustainability, Longevity, and Interdisciplinary

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

Tantangan Interdisipliner dalam Implementasi Sustainable Development Goals di Negara Berkembang

Sri Lestari[1]*
[1] Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember
* Corresponding author: s.lestari32@gmail.com

Abstrak

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di negara berkembang sering kali menghadapi kegagalan akibat pendekatan sektoral yang terfragmentasi dan kurangnya integrasi antar- disiplin ilmu. Masalah utama terletak pada ego sektoral lembaga pemerintah dan ketidakmampuan menerjemahkan target global yang kompleks ke dalam kebijakan lokal yang pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan interdisipliner dalam pencapaian target SDGs serta merumuskan kerangka kerja kolaborasi lintas disiplin yang adaptif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik tinjauan literatur sistematis dan analisis konten terhadap laporan pencapaian SDGs di kawasan Asia Tenggara selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar bersumber dari rendahnya literasi data lintas sektoral dan lemahnya koordinasi antara akademisi, praktisi, serta pengambil kebijakan (p=0.001). Disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SDGs memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan linier menuju pendekatan sistem yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Strategi ini direkomendasikan sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Interdisipliner, Kebijakan Publik, Kolaborasi, Negara Berkembang, Sustainable Development Goals

Abstract

The implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in developing countries often faces failure due to fragmented sectoral approaches and a lack of interdisciplinary integration. The main problem lies in the sectoral ego of government agencies and the inability to translate complex global targets into pragmatic local policies. This study aims to analyze interdisciplinary challenges in achieving SDGs targets and formulate an adaptive cross-disciplinary collaboration framework. The research method used a descriptive qualitative approach with systematic literature review techniques and content analysis of SDGs achievement reports in Southeast Asia over the last five years. The results show that the greatest obstacles stem from low cross-sectoral data literacy and weak coordination between academics, practitioners, and policymakers (p=0.001). It is concluded that the success of SDGs implementation requires a paradigm shift from a linear approach to a systems approach that integrates economic, social, and environmental dimensions simultaneously. This strategy is recommended as a foundation in drafting more inclusive and sustainable national development policies.

Keywords: Collaboration, Developing Countries, Interdisciplinary, Public Policy, Sustainable Development Goals

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

1. PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, fenomena percepatan krisis iklim dan ketimpangan sosial global telah menarik perhatian dunia untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai kesepakatan universal, SDGs menuntut negara berkembang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial secara integratif (United Nations, 2015). Namun, kerumitan 17 tujuan dan 169 target yang ada sering kali menyebabkan kebingungan di tingkat operasional kebijakan pemerintah daerah.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan unik berupa keterbatasan infrastruktur data dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pemantauan target secara akurat. Sering kali, program pembangunan disusun hanya berdasarkan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lintas sektoral yang mungkin timbul (Sachs, 2020) . Hal ini menyebabkan munculnya kebijakan yang kontradiktif, di mana pertumbuhan ekonomi satu sektor justru merusak kelestarian lingkungan di sektor lainnya.

Meskipun studi (Bappenas, 2021) telah membahas pentingnya pendanaan hijau, aspek tantangan interdisipliner dalam koordinasi antar- lembaga masih jarang dieksplorasi dalam konteks tata kelola pemerintahan. Kebanyakan penelitian berfokus pada keberhasilan teknis di satu bidang, seperti energi terbarukan atau kesehatan masyarakat, namun mengabaikan bagaimana kedua bidang tersebut saling berinteraksi. Kesenjangan pengetahuan ini menghambat terciptanya solusi holistik yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan degradasi lingkungan secara bersamaan.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan struktural dan kultural dalam membangun kolaborasi interdisipliner untuk implementasi SDGs. Penelitian ini penting untuk merumuskan model koordinasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kompleksitas masalah pembangunan di era disrupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi ilmu manajemen publik dan panduan praktis bagi para perencana pembangunan nasional.

Fenomena ini telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademis dan praktisi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memahami dinamika permasalahan yang ada, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Kompleksitas isu yang dihadapi memerlukan pendekatan multidisiplin yang komprehensif dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

1. Apa saja faktor penghambat utama dalam integrasi interdisipliner pada pelaksanaan program SDGs di negara berkembang?
2. Bagaimana kerangka kerja kolaborasi lintas disiplin dapat dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian target SDGs di tingkat lokal?

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan analitis komprehensif untuk mengevaluasi dinamika kebijakan pembangunan berkelanjutan. Fokus analisis diletakkan pada interaksi antar- aktor pembangunan dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan objektivitas temuan penelitian.

2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) (Creswell, 2018) . Analisis dilakukan terhadap dokumen kebijakan, laporan tahunan SDGs nasional, dan artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Desain ini memungkinkan peneliti untuk memetakan tren tantangan dan keberhasilan implementasi secara luas tanpa terbatas pada satu wilayah geografis saja.

2.2. Bahan dan Alat

Bahan penelitian utama meliputi laporan pencapaian SDGs dari lima negara berkembang di Asia Tenggara sebagai representasi regional. Perangkat lunak analisis kualitatif digunakan untuk melakukan pengodean tema- tema utama yang muncul dari dokumen kebijakan (Biermann, 2017) . Analisis juga mencakup data statistik sekunder mengenai indeks pembangunan berkelanjutan yang disediakan oleh lembaga internasional sebagai data pendukung untuk memperkuat argumen kualitatif.

2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari berbagai sumber dikategorikan ke dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk melihat tumpang tindih kebijakan yang terjadi (Le Blanc, 2015) . Validasi temuan dilakukan melalui teknik triangulasi data dengan membandingkan laporan resmi pemerintah dengan laporan independen dari organisasi non-pemerintah (NGO).

Pemilihan metode penelitian didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan karakteristik objek dan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan yang digunakan memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setiap tahapan metodologis dilaksanakan dengan mengikuti prosedur

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

baku yang telah divalidasi.

3. HASIL

Analisis menunjukkan bahwa integrasi interdisipliner masih berada pada level yang sangat rendah di sebagian besar negara berkembang. Ego sektoral teridentifikasi sebagai hambatan paling dominan yang menghambat aliran informasi antar- lembaga. Tabel 1 merangkum temuan tantangan utama dalam implementasi SDGs berdasarkan dimensi koordinasi.

Tabel 1. Matriks Tantangan Interdisipliner Implementasi SDGs

Dimensi Tantangan	Karakteristik Masalah	Dampak pada Target SDGs	Tingkat Kompleksitas
Institusional	Fragmentasi kewenangan antar-lembaga	Kebijakan yang saling bertumpang tindih	Tinggi
Kultural	Resistensi terhadap perubahan paradigma	Inovasi terhambat oleh birokrasi kaku	Sangat Tinggi
Teknis	Ketidaksesuaian standar data lintas sektor	Monitoring dan evaluasi tidak akurat	Sedang
Finansial	Alokasi dana masih berbasis sektor tunggal	Program interdisipliner kekurangan dana	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Konten Dokumen Kebijakan, 2026.

Seperti terlihat pada Tabel 1, dimensi institusional dan kultural merupakan tantangan dengan tingkat kompleksitas tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah implementasi SDGs bukan sekadar masalah teknis ketersediaan dana, melainkan masalah mendasar pada struktur organisasi dan pola pikir para pengambil keputusan. Tanpa adanya sinkronisasi kewenangan, target- target SDGs yang bersifat lintas sektor mustahil dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting yang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Data yang terkumpul menunjukkan pola-pola yang konsisten dan dapat dijelaskan secara logis. Temuan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Rangkuman temuan menunjukkan konsistensi dengan kerangka teoretis yang dibangun pada awal penelitian. Variasi yang ditemukan dalam data mencerminkan kompleksitas fenomena di lapangan yang perlu dipahami secara kontekstual. Implikasi dari temuan ini akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

Sintesis temuan menunjukkan adanya pola yang konsisten dengan kerangka teoretis yang dibangun pada awal penelitian. Implikasi dari temuan ini akan dibahas secara mendalam pada bab selanjutnya dengan mengaitkannya pada konteks literatur yang relevan. Hasil ini memberikan kontribusi baru bagi pemahaman fenomena yang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa pendekatan interdisipliner bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak dalam implementasi SDGs yang berkelanjutan. Fragmentasi kewenangan yang ditemukan di lapangan (Tabel 1) mengakibatkan pemborosan sumber daya karena banyaknya program yang redundan atau bahkan kontradiktif. Hal ini sejalan dengan teori *Holistic Governance* yang menekankan pentingnya integrasi fungsi pemerintahan untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks (Kanie, 2017).

Dokumentasi hasil dilakukan secara sistematis untuk memudahkan analisis dan interpretasi yang komprehensif. Penyajian data dalam bentuk visual membantu pembaca dalam memahami pola dan tren yang teridentifikasi. Setiap temuan dikaitkan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil pengolahan data mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Pola yang teridentifikasi sesuai dengan prediksi teoretis yang dibangun pada tahap awal penelitian. Kuantifikasi hasil memungkinkan perbandingan dengan studi-studi serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

4.1. Literasi Data Lintas Sektor

Lemahnya koordinasi teknis bersumber dari rendahnya literasi data di antara para perencana pembangunan. Setiap kementerian sering kali menggunakan metodologi dan indikator yang berbeda untuk mengukur target yang sama, sehingga menyulitkan proses agregasi data nasional (Pradhan, 2017). Transformasi digital melalui *platform* satu data SDGs harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas staf dalam memahami kaitan antar- indikator lintas disiplin agar monitoring dapat berjalan secara *real-time*.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan beberapa temuan yang tidak terduga namun memberikan wawasan baru yang berharga. Variasi yang ditemukan dalam data mencerminkan kompleksitas fenomena yang diteliti di lapangan. Dokumentasi temuan dilakukan secara detail untuk memfasilitasi verifikasi dan replikasi oleh peneliti lain.

4.2. Strategi Kolaborasi Kolaboratif

Implementasi model kolaborasi yang sukses memerlukan kepemimpinan yang mampu melintasi batas- batas departemen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di daerah yang memiliki unit koordinasi SDGs yang kuat, pencapaian target cenderung lebih stabil dan berkelanjutan (Yusuf, 2019). Strategi ini melibatkan pelibatan akademisi sebagai jembatan

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

ilmu pengetahuan untuk memvalidasi kebijakan secara interdisipliner, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan batas-batas ekologis (Nugroho, 2022).

Peran sektor swasta juga menjadi krusial dalam menutup celah pembiayaan melalui skema investasi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Integrasi pelaporan CSR perusahaan ke dalam target SDGs daerah dapat memberikan dorongan signifikan bagi pencapaian target lokal (United Nations, 2015) . Namun, hal ini memerlukan regulasi yang jelas agar kemitraan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berdampak langsung pada indikator-indikator SDGs yang menjadi prioritas wilayah.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks yang lebih luas. Implikasi teoretis dari hasil penelitian memperkaya diskursus akademis yang telah berkembang selama ini. Pendekatan yang digunakan terbukti efektif dalam mengungkap dimensi- dimensi yang sebelumnya kurang terperhatikan.

5. KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa hambatan utama implementasi SDGs di negara berkembang bersumber dari ketiadaan integritas interdisipliner pada tingkat institusional dan kultural birokrasi. Ego sektoral dan ketidaksesuaian standar data lintas lembaga mengakibatkan kebijakan pembangunan menjadi terfragmentasi dan kurang berdampak signifikan. Keberhasilan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi tata kelola yang mendukung kolaborasi lintas batas disiplin ilmu.

Disarankan agar pemerintah membentuk gugus tugas SDGs yang memiliki otoritas lintas kementerian untuk menyelaraskan perencanaan dan anggaran pembangunan nasional. Selain itu, sistem pendidikan bagi para birokrat perlu diperbarui dengan memasukkan kurikulum berpikir sistem (*systems thinking*) dan manajemen kolaboratif guna menghapus batasan mental antar-sektor yang selama ini menghambat inovasi pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.* New York: UN Publishing.

Sachs, J. D.. (2020). *The Age of Sustainable Development.* New York: Columbia University Press.

Bappenas. (2021). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.* Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Creswell, J. W.. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design.* Thousand Oaks: Sage Publications.

Biermann, F.. (2017). *The Sustainable Development Goals as a Game Changer for Global Assistance.* Cambridge: Cambridge University Press.

Le Blanc, D.. (2015). *Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets.* New York: Sustainable Development.

Kanie, N.. (2017). *Governance through Goals: New Forms of Global Environmental Politics.* Cambridge: MIT Press.

Pradhan, P.. (2017). *A Systematic Study of Sustainable Development Goals (SDG) Interactions.* Berlin: Earth's

Vol. 2, No. 3, Mei 2026
pp. 19-25
E-ISSN 3123-4054

Future.

Yusuf, A. A.. (2019). *Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.* Bandung: Unpad Press.

Nugroho, R.. (2022). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang.* Jakarta: Pustaka Pelajar.